

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu yang berkelanjutan, upaya terhadap peningkatan pada sektor-sektor vital menarik untuk terus diperbincangkan. Salah satu diantaranya adalah evaluasi kurikulum. Hasan (2014) menggambarkan bahwa evaluasi kurikulum adalah suatu aktivitas ilmiah yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pengembangan kurikulum. Keduanya tidak terpisahkan dan hubungan antara keduanya adalah seperti gigi roda. Evaluasi kurikulum tanpa kurikulum tidak punya arti, sebaliknya kurikulum tanpa evaluasi tidak akan mendapatkan hasil maksimal, baik dalam proses konstruksi kurikulum maupun dalam proses pelaksanaan kurikulum.

Pada tataran pelaksanaan kurikulum acuan yang kita miliki adalah delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi (1) Standar Isi, (2) Standar Kompetensi Lulusan, (3) Standar Proses, (4) Standar Sarana dan Prasarana, (5) Standar Pengelolaan, (6) Standar Pembiayaan Pendidikan, (7) Standar Penilaian Pendidikan dan Standar Pendidik (8) dan Tenaga Kependidikan. Standar tersebut telah mengatur berbagai aspek yang mendukung terwujudnya visi dan misi dari pengembangan suatu kurikulum yang digunakan saat ini. Jika kita melihat lebih dalam mengenai kedelapan standar ini, peneliti berasumsi bahwa pemegang kunci keberhasilan dari terlaksananya standar-standar tersebut adalah guru. Hal tersebut dapat dicermati dalam berbagai peraturan produk, sebagai contoh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan, diuraikan mengenai kompetensi-kompetensi lulusan pada tiap satuan pendidikan yang harus dicapai. Meskipun jika dilihat kontennya ditujukan kepada peserta didik, bukan berarti guru tidak ikut andil dalam hal ini. Justru seorang guru wajib berpedoman pada standar ini, sebelum memutuskan “bagaimana” pembelajaran akan diselenggarakan di kelas nantinya. Contoh

selanjutnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2016 tentang Standar isi, diuraikan bagaimana Kompetensi Inti (KI) diturunkan ke dalam tema-tema pembelajaran, dari tema-tema tersebut kemudian terkandung Kompetensi Dasar (KD) yang selanjutnya di terjemahkan dalam Indikator dan Tujuan Pembelajaran. Pada tahapan ini, guru dituntut secara profesional meracik suatu konten pembelajaran yang hasil akhirnya sesuai pada standar kompetensi lulusan sebelumnya. Tidak berhenti disini saja, guru juga harus memperhatikan standar-standar lainnya yaitu standar proses dan standar penilaian. Oleh karena itu, melalui standar nasional pendidikan kita bisa melihat bahwa profesionalisme guru erat kaitannya dengan keberhasilan suatu kurikulum. Maka tidak salah jika Nurzaman (2018) mengatakan bahwa guru merupakan ujung tombak keberhasilan implementasi kurikulum 2013.

Upaya-upaya dalam meningkatkan profesionalisme guru terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu bentuk usaha konkritnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan sub bidang pendidikan diprioritaskan untuk meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan melalui : (1) penguatan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa; (2) pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sah dan andal serta dilakukan secara transparan dan berkesinambungan; (3) peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan perbaikan desain program dan keselaran disiplin ilmu; (4) pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG/MGMP; dan (5) pelaksanaan pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi/kompetensi bagi tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas.

Diantara kelima poin tersebut, Penilaian Kinerja Guru adalah kegiatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan, karena teknis pelaksanaannya dilakukan pada level mikro yaitu pengawas, kepala sekolah, guru dan wali murid. Sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 dikatakan bahwa kinerja guru dibingkai dalam lingkup beban tugas dan

tanggungjawabnya, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Artinya seluruh komponen kurikulum terurai dalam kegiatan evaluasi tersebut. Dengan demikian melalui pemaksimalan program Penilaian Kinerja Guru ini sama saja telah memaksimalkan seluruh komponen kurikulum. Mulai dari rencana, isi, organisasi kurikulum, strategi hingga evaluasi kurikulum teruraikan dalam kegiatan ini. sayangnya, dalam pelaksanaannya di lapangan program ini mengalami berbagai kendala.

Masalah pertama yang ditemukan penulis adalah secara umum kegiatan PKG bermasalah. Alasan ini diperoleh penulis melalui survei yang dilakukan kepada 50 responden guru melalui laman G-form (<https://forms.gle/6bh3z5Hw3JMfEzfW7>) yang dimulai tanggal 5 Februari hingga 12 Februari 2019 mengenai pelaksanaan program Penilaian Kinerja Guru (PK Guru), menyatakan bahwa partisipasi aktif kepala sekolah, guru dan wali murid dalam pelaksanaan PK Guru sangat rendah yaitu 30%. Kemudian sebanyak 37 responden menyatakan bahwa PK Guru hanyalah sebagai program administratif yang tidak sesuai dengan prosedur dalam buku panduan pelaksanaan PK Guru tahun 2018. Hambatan yang muncul juga hampir serupa dilontarkan oleh para responden yaitu diantaranya (1)Kepala sekolah tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan PK Guru; (2)Kepala sekolah kesulitan dalam menginput nilai dalam microsoft excel hingga akhirnya pelaksanaan diserahkan kepada orang yang mampu melaksanakannya; (3)Guru tidak siap. Masalah-masalah ini sebenarnya bukan menjadi rahasia lagi dikalangan para guru. Pelaksanaan PK guru selama ini memang belum maksimal dan celah untuk tidak melakukan apa yang telah diprosedurkan dalam buku panduan juga sangat besar. Bahkan, tak jarang guru setelah PK Guru akan kembali dengan habitat seperti biasanya (Donot, 2016:126). Padahal potensi dari PK Guru dalam meningkatkan kompetensi guru ini cukup besar. Secara teori, menurut Permeneg PAN dan RB No.16 Tahun 2009 program ini merupakan penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya. Oleh karena itu, didalam proses PK Guru ini melibatkan seluruh komponen-

komponen kurikulum yang akan dievaluasi yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hasil pembelajaran, bimbingan dan pelatihan terhadap peserta didik dan tugas-tugas tambahan pada kegiatan pokok lainnya yang sesuai dengan beban kerja guru yang bersangkutan (kemdikbud,2018).

Masalah kedua yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa pengembang swasta untuk membantu proses PK Guru ini beberapa kali telah dilakukan mulai dari berbasis microsoft excel hingga website. Salah satunya pada laman <http://pkguru.com/index.php>. Dalam website tersebut telah dikembangkan sebuah program PKG berbasis website. kurang lebih sekitar 50 sekolah berbagai jenjang telah terdaftar sebagai member. Namun program tersebut hanya bertahan hingga tahun 2017 terlihat dari update terakhir yang dilakukan oleh developer. Belum diketahui apa penyebab utama program tersebut tidak dijalankan lagi. Namun hal tersebut mengindikasikan, produk tersebut memang belum cukup sesuai di kalangan tenaga pendidikan. Sehingga, perlu ada teknologi yang lebih sederhana daripada website. Penyederhanaan PKG perlu dilakukan karena Indikator-indikator yang digunakan selama proses PK Guru ini cukup banyak dan komperhensif dalam menilai seluk-beluk kompetensi dari seorang guru. Sehingga jika program PK Guru ini benar-benar dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, penulis berkeyakinan kontrol terhadap kompetensi guru akan bagus, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas dari guru yang di-PK.

Masalah terakhir adalah PKG sulit direalisasikan secara ideal. Hal tersebut dikuatkan oleh wawancara penulis dengan salah satu guru SDN di Kabupaten Situbondo, Lukman Nur Hidayat, yang mengatakan

“PK Guru menjadi alat penilaian yang tidak objektif lagi. Kepala sekolah dengan segala rutinitas yang ada, tidak memiliki waktu untuk melakukan proses PK Guru. Alhasil, proses penilaian sesuai subjektivitas kepala sekolah tersebut tanpa melakukan proses Penilaian Kinerja guru yang bersangkutan”

Berdasarkan masalah-masalah yang muncul mengenai Program PK Guru yang banyak terjadi di lapangan saat ini, peneliti menganggap bahwa perlu ada solusi yang konkrit dengan asumsi bahwa kompetensi guru akan mampu ditingkatkan secara maksimal melalui proses PK Guru ini. Berpedoman pada prinsip praktis, akuntabel, berorientasi tujuan dan berkelanjutan, peneliti

beranggapan bahwa lima prinsip tersebut sulit direalisasikan melalui PK Guru secara konvensional. Perlu adanya sebuah terobosan baru yang mengintegrasikan teknologi saat ini. Salah satu yang paling *compatible* saat ini adalah teknologi berbasis android.

Android merupakan teknologi yang sudah umum dan dikenal oleh masyarakat kita dan sering dipergunakan dalam *smartphone* mereka, terlebih lagi guru, wali murid dan kepala sekolah, yang menjadi subjek penelitian ini. Dengan menyediakan sebuah *platform* penelitian yang terbuka, teknologi android menawarkan kemampuan untuk membangun aplikasi yang sangat kaya dan inovatif (Rasjid, 2014). Termasuk diantaranya menyelesaikan permasalahan evaluasi kurikulum. Penulis meyakini bahwa dengan menggunakan teknologi ini, selain unggul dalam pemrosesan data, teknologi ini juga akan membantu mempermudah pengolahan data akademik sekolah dan lebih maksimal serta praktis karena dapat diakses dari mana saja sekaligus menjaga data tetap aman yang sebelumnya semua dilakukan secara manual dan data mudah hilang (Djaelangara, 2015).

Bertitik tolak dari permasalahan yang dikemukakan di atas, dapat diduga bahwa penelitian pengembangan aplikasi PKG akan berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan program PK Guru di jenjang sekolah dasar. Namun demikian, hal ini belum tentu benar bahwa pengembangan aplikasi ini memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap efisiensi pelaksanaan PK Guru jenjang sekolah dasar, sehingga perlu diteliti untuk mengetahui hal tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul "*Pengembangan Aplikasi Penilaian Kinerja Guru Berbasis Android untuk Guru Sekolah Dasar*".

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Merujuk pada berbagai fakta yang mendasari penelitian pengembangan aplikasi evaluasi perangkat pembelajaran berbasis android ini, adapun permasalahan yang diangkat oleh peneliti secara khusus dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi pelaksanaan penilaian kinerja guru di lapangan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi penilaian kinerja guru berbasis android untuk guru sekolah dasar?
2. Bagaimana proses pengembangan aplikasi penilaian kinerja guru berbasis android untuk guru sekolah dasar?
3. Bagaimana ujicoba aplikasi penilaian kinerja guru berbasis android untuk guru sekolah dasar?
4. Bagaimana efektivitas aplikasi penilaian kinerja guru berbasis android untuk guru sekolah dasar?
5. Bagaimana penilaian pengguna terhadap aplikasi penilaian kinerja guru berbasis android untuk guru sekolah dasar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk :

1. Mendokumentasikan kondisi pelaksanaan penilaian kinerja guru di lapangan sebagai dasar dalam penyusunan aplikasi penilaian kinerja guru berbasis android untuk guru sekolah dasar
2. Mendokumentasikan tahapan-tahapan pengembangan aplikasi penilaian kinerja guru berbasis android untuk guru sekolah dasar.
3. Mendokumentasikan ujicoba aplikasi penilaian kinerja guru berbasis android untuk guru sekolah dasar
4. Menguji efektivitas aplikasi penilaian kinerja guru berbasis android untuk guru sekolah dasar
5. Menganalisis penilaian pengguna terhadap aplikasi penilaian kinerja guru berbasis android untuk guru sekolah dasar

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian pengembangan ini, setidaknya ada dua manfaat yang bisa diperoleh yaitu manfaat secara substantif dan administratif. Secara substantif, penelitian ini menawarkan gaya baru dalam bidang evaluasi dalam rangka ikut menjaga *khittah* PKG sebagai salah satu cara pemerintah untuk mengontrol kinerja dan kompetensi guru.

Secara administratif, manfaat penelitian aplikasi evaluasi perangkat pembelajaran berbasis android ini sebagai berikut

1. Bagi kepala sekolah, dapat membantu proses supervisi dan pengawasan terhadap kinerja guru dalam meningkatkan kompetensinya.
2. Bagi guru, dapat menjadi media kontrol terhadap kinerjanya agar selalu terus meningkatkan kompetensinya dalam rangka menjadi guru yang profesional.
3. Bagi wali murid dan siswa, dapat menjadi media komunikasi dan media kontrol untuk ikut serta dalam berkontribusi meningkatkan kompetensi guru.
4. Bagi pengawas, dapat menjadi alternatif pengganti PK Guru konvensional.
5. Bagi peneliti lain, sebagai rujukan untuk penelitian jenis evaluasi berbasis android dalam rangka untuk mensukseskan program PK Guru